

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak diartikan sebagai kegiatan mentransfer ilmu, teori dan fakta-fakta akademik semata, atau bukan sekedar urusan ujian, penetapan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan dimaknai sebagai proses pematangan kualitas hidup, sehingga dengan proses tersebut manusia diharapkan mampu memahami arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, dan akhlak.

Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap hati nuraninya. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia berada diluar dirinya. Pendidikan harus mampu menyatukan sikap, pemikiran, perilaku, hati nurani, dan keimanan menjadi satu kesatuan yang utuh (Mulyasana, 2012: iii)

Ki Hajar Dewantara, berpendapat “Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”. (Hasbullah, 2008: 4)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konteks ini, maka tujuan pendidikan adalah sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing, dan mempertahankan kehidupannya dimasa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

Pendidikan agama mulai digugat eksistensinya sejak pemikiran manusia memasuki tahap positif dan fungsional sekitar abad ke-18. Suasana kehidupan modern dengan kebudayaan massif serta terpenuhinya berbagai mobilitas kehidupan secara teknologis-mekanis, pada satu sisi telah melahirkan krisis etika dan moral. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena masing-masing orang mengedepankan kepentingan dan egonya.

Krisis moral tersebut tidak hanya melanda masyarakat lapisan bawah (*grass root*), tetapi juga meracuni atmosfir birokrasi negara mulai dari tingkat paling atas sampai paling bawah. Munculnya fenomena *white collar crimes* (kejahatan kera putih atau kejahatan yang dilakukan oleh kaum berdasi), serta isu KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh para elit,

merupakan indikasi kongkrit bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensional.

Realitas di atas mendorong timbulnya berbagai gugatan terhadap efektivitas pendidikan agama yang selama ini dipandang oleh sebagian besar masyarakat telah gagal dalam membangun afektif anak didik dengan nilai-nilai yang *eternal* serta mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Terlebih lagi dalam hal ini, dunia pendidikan yang mengemban peran sebagai pusat pengembangan ilmu dan SDM, pusat sumber daya penelitian dan sekaligus pusat kebudayaan kurang berhasil, kalau tidak dikatakan gagal dalam mengemban misinya. Sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pengisian kognitif sehingga melahirkan lulusan yang cerdas tetapi kurang bermoral. Aspek afektif dan psikomotor yang sangat vital keberadaannya terabaikan begitu saja. (Azizy, 2002: 8-14)

Fenomena di atas tidak terlepas dari adanya pemahaman yang kurang benar tentang agama dan keberagaman. Agama sering kali dimaknai secara dangkal, tekstual dan cenderung eksklusif. Nilai-nilai agama hanya dihafal sehingga hanya berhenti pada wilayah kognisi, tidak sampai menyentuh aspek afeksi dan psikomotorik. (Sahlan, 2012: 37-38)

Menurut Fuaduddin dan Bisri dalam Sahlan (2009: 26-27) ada tiga hal yang bisa dikemukakan untuk membuktikan kekurangan-kekurangan orientasi pendidikan agama, yaitu.

1. Pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama.
2. Tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga sering ditemukan hal-hal yang prinsipil yang seharusnya dipelajari lebih awal, justru terlewatkan, misalnya pelajaran keimanan.
3. Kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit dan konteksnya.

Lintasan sejarah, guru senantiasa diceritakan sebagai orang yang memegang peranan penting, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga diseluruh sendi kehidupan. Dalam sejarah Mesir kuno, misalnya guru-guru itu adalah para filsuf yang menasehati raja. Kata-kata guru menjadi pedoman dalam memimpin negara. Dalam zaman kegemilangan falsafah Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah guru-guru yang mempengaruhi perjalanan sejarah Yunani. (Putra, 2014: 6)

Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bisa dilepaskan diri guru sebagai pribadi. Kepribadian guru sangat mempengaruhi peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. Guru mendidik dan membimbing para siswa tidak hanya dengan bahan yang ia sampaikan atau dengan metode-metode penyampaian yang digunakannya, tetapi dengan seluruh kepribadiannya. Mendidik dan membimbing tidak hanya diajarkan tetapi juga ditularkan. Pribadi guru merupakan satu kesatuan antara sifat-sifat pribadinya, dan peranannya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing (Sukmadinata, 2005: 251)

Menurut Kasdin dalam Najib, dkk (2016: 1) bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang mengakui dan mengimani adanya Tuhan sebagai Pencipta. Secara yuridis formal, religiusitas tersebut tercermin pada sila pertama pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Religiusitas bangsa Indonesia juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang menyatakan bahwa “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Statement pada alinea tersebut mengandung suatu pesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan beriman kepada Tuhan, dan kemerdekaan yang didapatkannya merupakan karunia dari Tuhan.

Menurut Anwar dalam Najib, dkk (2016: 2) dalam konteks pembangunan nasional, religiusitas bangsa Indonesia juga tercermin disetiap bidang pembangunan. Pada bidang pendidikan misalnya, pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter.

Fakta di lapangan berbeda dengan hal diatas bangsa Indonesia yang tadinya religius dan berkarakter kini tengah mengalami krisis karakter. Berbagai kasus menunjukkan akan hal itu, mulai kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab, kasus perdagangan

beras plastik, kasus susu oplosan (mencampur susu dengan *deterjen*) hingga kasus perseteruan antar pemimpin, seperti antara menteri pemuda dan olahraga. Dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakibatkan ratusan lebih pemain sepak bola di Indonesia tidak bisa menafkahi dirinya dan keluarganya.

Seakan tak mau kalah dengan orang dewasa, peserta didik di Indonesia pun kini mengalami krisis karakter. Saat ini begitu mudah ditemukan kasus-kasus seperti pornoaksi, aborsi, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, *bullying*, bolos sekolah, mencontek saat ujian dan ulangan serta pencurian, suka menerabas aturan, dan lainnya (Najib, 2016: 2)

Menjadi kewajiban kita semua yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara ini untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh agar hal tersebut dapat diubah menjadi lebih baik sebagaimana amanat cita-cita proklamasi kemerdekaan. Banyak jalan menuju surga, tetapi jalan yang paling tepat dan cepat adalah berjuang melalui pendidikan, dakwah, dan sosial. Inilah yang mengilhami keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah di Banyumas, merealisasikannya lewat Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Purwokerto yang di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, sebagai kelanjutan dari lembaga pendidikan yang telah dirintis selama 47 tahun yang awalnya adalah Madrasah Muallimin Muallimat Muhammadiyah Purwokerto.

Sejalan dengan cita-cita KH. Ahmad Dahlan tersebut maka para aktivis dakwah di Purwokerto dan sekitarnya pun tergerak hati untuk mendirikan Madrasah Muallimin Muallimat Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 1 Januari 1968 yang merupakan cikal bakal Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto. Dengan tetap mempertahankan idealisme pendiri "Muallimin" tersebut untuk membentuk kader ulama yang berkemajuan maka sekarang Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purwokerto terus berazzam menjadi sekolah kader persyarikatan yang siap mencetak para pejuang dan ulama yang siap menghadapi tantangan di masa depan".

Istilah *tukang* bengkel seakan sudah disematkan untuk bapak ibu guru di MA Muhammadiyah Purwokerto, karena sudah menjadi sebuah langganan dimana MA Muhammadiyah Purwokerto itu sendiri menerima siswa atau peserta didik dari sekolah-sekolah lain dalam kasus tertentu, sehingga ia dikeluarkan dari sekolahnya. Maka dari pihak sekolah MA Muhammadiyah Purwokerto menerimanya, bukan lantaran karena kekurangan murid, melainkan sebagai bentuk wujud kepedulian dan sebagai bentuk cita-cita Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kyai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai "ulama-intelek" atau "intelektulama", yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Maka bapak ibu guru MA Muhammadiyah Purwokerto, siap membimbing, mendampingi, dan mengarahkan. Selama siswa tersebut ada keinginan untuk menjadi siswa yang baik, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Melanjuti kegiatan tersebut, maka dari pemaparan dari latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam dan menuangkanya dalam sebuah karya ilmiah berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan judul : peran guru dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas kepada siswa MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: “ bagaimana peran guru dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas kepada siswa MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut: mengetahui peran Guru dalam mengembangkan nilai-nilai Religiusitas kepada siswa MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan khazanah keilmuan tentang peran guru dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas kepada siswa MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk mengetahui berapa besar dan pentingnya menjalankan peran menjadi seorang guru dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas kepada peserta didiknya.
- 2) Mengetahui bagaimana cara guru dalam mengembangkan nilai religiusitas kepada peserta didiknya.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi pengetahuan tentang peran guru dalam mengembangkan nilai-nilai religiusitas kepada siswa MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas.

c. Bagi Sekolah MA Muhammadiyah Purwokerto

- 1) Sebagai sumbangan untuk menambah literatur bagi perpustakaan di MA Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- 2) Menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan MA Muhammadiyah Purwokerto yang lebih baik lagi.